

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TANGGAL : 13 NOVEMBER 2025**



**TENTANG**

**PERSETUJUAN  
RANCANGAN KUA – PPAS  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194  
Rembang 59212**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
R E M B A N G

---

## RISALAH

### PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 November 2025  
Waktu : 09.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
  1. Pembukaan;
  2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
  3. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
  4. Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
  5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
  6. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
  1. Nama : H. ABDUL ROUF
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang        |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa    | : 8 orang        |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan               | : 7 orang        |
| 4. Fraksi Demokrat                     | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya              | : 8 orang        |
| 6. Fraksi Hanura Amanah                | : 6 orang        |
| Jumlah                                 | <hr/> : 45 orang |

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 7 orang        |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa    | : 5 orang        |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan               | : 6 orang        |
| 4. Fraksi Demokrat                     | : 6 orang        |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya              | : 6 orang        |
| 6. Fraksi Hanura Amanah                | : 4 orang        |
| Jumlah                                 | <hr/> : 34 orang |

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 1 orang        |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa    | : 3 orang        |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan               | : 1 orang        |
| 4. Fraksi Demokrat                     | : 2 orang        |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya              | : 2 orang        |
| 6. Fraksi Hanura Amanah                | : 2 orang        |
| Jumlah                                 | <hr/> : 11 orang |

## IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

### LAGU INDONESIA RAYA

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat'

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang kami hormati,

- Sekretaris DPRD, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupten Rembang.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, taufiq dan Hidayah-Nya, hari ini Kamis, 13 November 2025 kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq umat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

#### ***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 28 orang. Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda dan APBD **dinyatakan** memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita teruskan.

Untuk itu, dengan mengucapkan "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 11.40 WIB rapat paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**( Ketuk palu 3 kali )**

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah dua dokumen penting yang nantinya menjadi landasan dan arah dalam penyusunan APBD. KUA menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan, dan PPAS menjadi acuan teknis perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perlu saya sampaikan, bahwa pelaksanaan pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 adalah tindak lanjut atas telah disampaikannya Rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD melalui surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/5159/2025 tanggal 24 Oktober 2025. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dibahas melalui beberapa tahapan rapat, baik Rapat Banggar dan TAPD, Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi, Rapat Komisi dan mitra kerja Perangkat Daerah, maupun rapat internal oleh Badan Anggaran. Hal ini merujuk Pasal 19 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Ke depan kami berharap penyampaian dan persetujuan terhadap Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai



Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Memperhatikan agenda dan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD pada rapat tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
4. Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
6. Penutup.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut Bupati Rembang melalui surat Nomor : 900/5145/2025 tanggal 23 Oktober 2025 telah menyampaikan permohonan Persetujuan Pemberian TPP ASN Tahun 2026 kepada Ketua DPRD. Berdasarkan surat yang disampaikan bahwa jumlah total Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN yang tersebar di 40 ( empat puluh ) perangkat daerah dan telah tercantum dalam Rancangan KUA PPAS

Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 62.675.301.485,00 ( enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ). Merujuk huruf D angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya saya mintakan persetujuan kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

**“ Apakah Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebesar Rp. 62.675.301.485,00 ( enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ) yang tersebar di 40 ( empat puluh ) Perangkat Daerah dapat disetujui ?”**

**===== SETUJU =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Kita ikuti acara ketiga yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Kepada juru bicara Badan Anggaran, Sdr. Nur Purnomo M, S.IP. disilahkan.

**==== LAPORAN BADAN ANGGARAN ====**

Terimakasih Saudara Sdr. Nur Purnomo M, S.IP. laporannya.

➤ **( Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 terlampir )**

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026. Oleh karena disetujui atau tidaknya Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS adalah tergantung

hasil pengambilan keputusan anggota, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara pada rapat paripurna ini.

**“ Apakah Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026  
sebagaimana yang dilaporkan Badan Anggaran  
dapat disetujui menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang  
Tahun Anggaran 2026?”**

**===== SETUJU =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )  
( Ketuk palu 1 kali )**

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Dari persetujuan anggota terhadap Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, maka perlu diimplementasikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Untuk kelancarannya, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan berikut penyerahan Surat Keputusan DPRD. Kepada Sekretariat DPRD, waktu disilahkan.

**=== PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PENYERAHAN  
SURAT KEPUTUSAN ===**

Terimakasih Sekretariat DPRD atas bantuannya.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Saya atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota Badan Anggaran, Pimpinan dan Anggota TAPD, Pimpinan dan anggota Komisi serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum saya akhiri, perlu saya laporkan kepada rekan-rekan



anggota bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 oleh Bapemperda, Pimpinan Pansus dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sesuai hasil fasilitasi Gubernur dan dituangkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor ... Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Memperhatikan rapat paripurna persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD pada tanggal 23 Juli 2025, dan telah dilakukannya penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sesuai hasil fasilitasi gubernur, maka Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dapat ditetapkan menjadi Peraturan DPRD dan akan diundangkan dalam Berita Daerah.

Akhirnya dengan mengucapkan "***Alhamdulillahirobbil 'alamin***" tepat pukul 12.04 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( ***Ketuk palu 3 kali*** )

Sekian,

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



**H. ABDUL ROUF**

SEKRETARIS,



**NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN :        RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN  
2026**

---

- LAMPIRAN I                : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, dan OPD dan Camat se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II              : Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Rancangan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN III             : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Persetujuan Rancangan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN IV             : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN IV             : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sesuai hasil fas Cilitasi Gubernur Jawa Tengah;
- LAMPIRAN V              : Nota Kesepakatan Nomor : 019.6/ 5342/ 2025 dan Nomor 019.6/ 83/ 2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN VI             : Nota Kesepakatan Nomor : 019.6/ 5342/ 2025 dan Nomor 019.6/ 83/ 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN VI             : Berita Acara Nomor : 100.1.4.2/ 84/ 2025 tentang Persetujuan Penghambilan Keputusan atas Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai/ Aparatur Sipil Negara ( TPP);



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025**  
**PUKUL : 09.00 WIB**

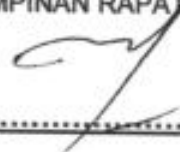
| NO | N A M A                                        | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                                              | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN<br/>PEMBANGUNAN</b> |                  |              |     |
| 1  | H. ABDUL ROUF                                  | Ketua DPRD       | 1            |     |
| 2  | SUMARDI                                        | Anggota          |              |     |
| 3  | H. MUHAMMAD ROFI'I                             | Anggota          | 3            |     |
| 4  | ABDUL MU'ID, S.IP.                             | Anggota          | 4            |     |
| 5  | H. SUPADI                                      | Anggota          | 5            |     |
| 6  | H. M. MURSYID, S.T.                            | Anggota          | 6            |     |
| 7  | M. LUTFI AFIFI, S.E.                           | Anggota          | 7            |     |
| 8  | NI'MA DIANA                                    | Anggota          | 8            |     |
|    |                                                |                  |              |     |
|    | <b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN<br/>BANGSA</b>    |                  |              |     |
| 9  | H. BISRI CHOLIL LAQOUF -                       | Wakil Ketua DPRD | 9            |     |
| 10 | ILYAS                                          | Anggota          | 10           |     |
| 11 | SUPADI -                                       | Anggota          | 11           |     |
| 12 | JOKO SUWITO, S.E.                              | Anggota          | 12           |     |
| 13 | MASLICHAN, S.E., M.M. -                        | Anggota          | 13           |     |
| 14 | NASIRUDIN, S.Si. -                             | Anggota          | 14           |     |
| 15 | MUHAMMAD IMRON                                 | Anggota          | 15           |     |
| 16 | ACHMAD LUTFY , S.T.                            | Anggota          | 16           |     |
|    |                                                |                  |              |     |
|    | <b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>                   |                  |              |     |
| 17 | RIDWAN, S.H., M.H.                             | Wakil Ketua DPRD | 17           |     |
| 18 | ADI PURWOTO                                    | Anggota          | 18           |     |
| 19 | NUR SAHID                                      | Anggota          | 19           |     |
| 20 | M. ROKIB, S.Pd.                                | Anggota          | 20           |     |
| 21 | DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.                    | Anggota          | 21           |     |
| 22 | H. WIDODO, S.H.                                | Anggota          | 22           |     |
| 23 | LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.               | Anggota          | 23           |     |

| NO | N A M A                       | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|-------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                             | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI DEMOKRAT</b>        |                  |              |     |
| 24 | H. GUNASIH, S.E.              | Wakil Ketua DPRD | 24           |     |
| 25 | H. PARLAN, S.Pd.I.            | Anggota          | 25           |     |
| 26 | JOKO SUPRIHADI, S.H.          | Anggota          | 26           |     |
| 27 | MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.  | Anggota          | 27           |     |
| 28 | ACHMAD ZAMHURI, S.H.          | Anggota          | 28           |     |
| 29 | MUGIYARTO, S.T.               | Anggota          | 29           |     |
| 30 | AHMAD SHODIQIN, S.H.          | Anggota          | 30           |     |
| 31 | PUJI SANTOSO, S.P., M.H.      | Anggota          | 31           |     |
|    | <b>FRAKSI NASDEM BERKARYA</b> |                  |              |     |
| 32 | H. YATIN ABDUL ZAENAL         | Anggota          | 32           |     |
| 33 | KHAMID, S.E., Sy.             | Anggota          | 33           |     |
| 34 | SUSTIYONO                     | Anggota          | 34           |     |
| 35 | MASHADI, S. Pd., M.M.         | Anggota          | 35           |     |
| 36 | SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.  | Anggota          | 36           |     |
| 37 | FRIDA IRIANI                  | Anggota          | 37           |     |
| 38 | ABSANTO                       | Anggota          | 38           |     |
| 39 | MARYONO                       | Anggota          | 39           |     |
|    | <b>FRAKSI HANURA AMANAH</b>   |                  |              |     |
| 40 | H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H. | Anggota          | 40           |     |
| 41 | NANDANA FATKHULLAH ZARKASI    | Anggota          | 41           |     |
| 42 | RUMINI                        | Anggota          | 42           |     |
| 43 | DUMADIYONO, S.H.              | Anggota          | 43           |     |
| 44 | NUR ARSYA IRFANA, S.M.        | Anggota          | 44           |     |
| 45 | SAHNINGSIH, S.E.              | Anggota          | 45           |     |

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG  
PIMPINAN RAPAT

  
.....

DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025  
PUKUL : 09.00 WIB

| NO | N A M A                          | JABATAN              | TANDA TANGAN                                                                                |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | H. HARNO, S.E.                   | Bupati Rembang       | 1. ....  |
| 2  | H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO. | Wakil Bupati Rembang | 2. ....  |
| 3  | Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA     | Sekretaris Daerah    | 3. ....  |

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP  
NIP. 19730401 199303 1 002



**DAFTAR HADIR CAMAT  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025**

**PUKUL : 09.00 WIB**

| NO | JABATAN       | NAMA           | TANDA TANGAN |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1  | 2             | 3              | 4            |
| 1  | CAMAT REMBANG | DIYONO         | 1            |
| 2  | CAMAT KALIORI | DESTI MURAYADI | 2            |
| 3  | CAMAT SUMBER  | Hza. Gubeno    | 3            |
| 4  | CAMAT SULANG  | E. Hesus DE    | 4            |
| 5  | CAMAT BULU    | Moch Soleh     | 5            |
| 6  | CAMAT PAMOTAN | Dwi P.,        | 6            |
| 7  | CAMAT GUNEM   |                | 7            |
| 8  | CAMAT SALE    | ROPINBI        | 8            |
| 9  | CAMAT LASEM   | Mundari        | 9            |
| 10 | CAMAT PANCUR  | Sutarwo        | 10           |
| 11 | CAMAT SEDAN   | KASTARI        | 11           |
| 12 | CAMAT SLUKE   | Mobilin Effend | 12           |
| 13 | CAMAT KRAGAN  | Niasaton R     | 13           |
| 14 | CAMAT SARANG  | Nurwanto       |              |

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

  
NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP  
NIP. 19730401 199303 1 002

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025

PUKUL : 09.00 WIB

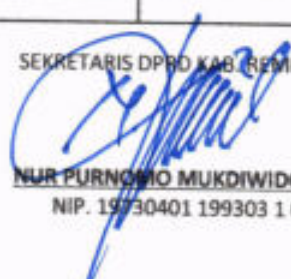
| NO | BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR       | N A M A         | JABATAN    | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 1  | 2                               | 3               | 4          | 5            |
| 1  | STAF AHLI BUPATI                | SD/ Teguh W.    | STAF AHLI  | 1            |
| 2  | STAF AHLI BUPATI                |                 |            | 2            |
| 3  | STAF AHLI BUPATI                | Budi Amara      |            | 3            |
| 4  | ASISTEN I SEKDA                 |                 |            | 4            |
| 5  | ASISTEN II SEKDA                | Margi           | As Eksek   | 5            |
| 6  | ASISTEN III SEKDA               | Sapriyanto      | Pelaksana  | 6            |
| 7  | BAG. PEMERINTAHAN               |                 |            | 7            |
| 8  | BAG. HUKUM                      |                 |            | 8            |
| 9  | BAG. PROKOPIMDA                 |                 |            | 9            |
| 10 | BAG. ADM. PEMBANGUNAN           | Wijoyo          | Ka. Prof.  | 10           |
| 11 | BAG. PEREKONOMIAN               | Nugroho         | Kabang.    | 11           |
| 12 | BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT       | Maruli Dwi R    |            | 12           |
| 13 | BAG. ORGANISASI                 | Heru Sutilo     | KABAG. OR  | 13           |
| 14 | BAG. UMUM                       | Ani SW          | Kabang     | 14           |
| 15 | BAG. PBJ                        | M. Chom         | PPS Ka.    | 15           |
| 16 | BPPKAD                          | Fuad Anhari     | BPPKAD.    | 16           |
| 17 | INSPEKTORAT                     |                 |            | 17           |
| 18 | BAPPEDA                         | Solihin         | sekretaris | 18           |
| 19 | DINSOSPPKB                      | Nur F           | Sejarah    | 19           |
| 20 | B K D                           | Amir Nomola     | Kepala     | 20           |
| 21 | B P B D                         | Pramujo         | Sekretaris | 21           |
| 22 | DPU TATA RUANG                  | Motxosa         | Kadin      | 22           |
| 23 | DINPERKIM                       | Chris Pansatyma | Sekretaris | 23           |
| 24 | DINAS KESEHATAN                 |                 |            | 24           |
| 25 | DINDIKPORA                      | GUTABNO         | Kadin      | 25           |
| 26 | DININDAGKOP & UMKM              | Mushlihah       | Seledin    | 26           |
| 27 | DINPERINNAKER                   | Dwi Mardani     | Kadin      | 27           |
| 28 | DINTANPAN                       |                 |            | 28           |
| 29 | DINLUTKAN                       |                 |            | 29           |
| 30 | DINKOMINFO                      | Gautam          |            | 30           |
| 31 | DINAS PERHUBUNGAN               | Drupado         | Kapin      | 31           |
| 32 | DINAS DUKCAPIL                  | A. Patih K      | Sekretaris | 32           |
| 33 | DINPERMADES                     |                 |            | 33           |
| 34 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Isti Choma Wati | Sekretaris | 34           |
| 35 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP          | Andri           | K.L. dan   | 35           |

| NO | BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR   | N A M A            | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| 1  | 2                           | 3                  | 4       | 5            |
| 36 | BADAN KESBANGPOL            | Reedi Amran        |         | 36 Rea.      |
| 37 | DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN  | Dr. Bismar Intarya | Setdim  | 37           |
| 38 | DINAS PMPTSP                |                    |         | 38           |
| 39 | RSUD dr. R. SUTRASNO        |                    |         | 39           |
| 40 | SATPOL PP                   | Furman             | Kabid   | 40 Fmm       |
| 41 | TIM PKK KAB. REMBANG        |                    |         | 41           |
| 42 | P D A M                     |                    |         | 42           |
| 43 | PERCETAKAN DAERAH           |                    |         | 43           |
| 44 | PD. BANK PASAR              |                    |         | 44           |
| 45 | BANK JATENG CAB. REMBANG    |                    |         | 45           |
| 46 | BRI CAB. REMBANG            |                    |         | 46           |
| 47 | PD BPR BKK LASEM            |                    |         | 47           |
| 48 | PT. R B S J                 |                    |         | 48           |
| 49 | APOTIK DAERAH               |                    |         | 49           |
| 50 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA    |                    |         | 50           |
| 51 | KETUA KPU KAB. REMBANG      |                    |         | 51           |
| 52 | SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG |                    |         | 52           |
| 53 | H. Buty                     |                    |         | 53           |
| 54 | Nedgarto. Aoi Widas         |                    |         | 54           |
| 55 | Winda                       |                    |         | 55           |
| 56 | Fedy                        |                    |         | 56 F         |
| 57 | Gunak ci mo                 | Medrie             |         | 57           |
| 58 | Muse Rhusd                  | Prasmi             |         | 58           |
| 59 | Handi                       |                    |         | 59           |
| 60 | phn                         | Ade                |         | 60           |
| 61 | Eko Joko S                  | Bpptsd             |         | 61           |
| 62 | IFRAN N                     | Harmoni Centre     |         | 62           |
| 63 | M. Kurniawan                | Prakopmala         |         | 63           |
| 64 | Tri Nur Huda                |                    |         | 64 Hut       |
| 65 | Radio CBFM                  | Masudi             |         | 65           |
| 66 |                             |                    |         | 66           |
| 67 |                             |                    |         | 67           |
| 68 |                             |                    |         | 68           |
| 69 |                             |                    |         | 69           |
| 70 |                             |                    |         | 70           |



| NO  | BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------------------------|---------|---------|--------------|
| 1   | 2                         | 3       | 4       | 5            |
| 71  |                           |         |         | 71           |
| 72  |                           |         |         | 72           |
| 73  |                           |         |         | 73           |
| 74  |                           |         |         | 74           |
| 75  |                           |         |         | 75           |
| 76  |                           |         |         | 76           |
| 77  |                           |         |         | 77           |
| 78  |                           |         |         | 78           |
| 79  |                           |         |         | 79           |
| 80  |                           |         |         | 80           |
| 81  |                           |         |         | 81           |
| 82  |                           |         |         | 82           |
| 83  |                           |         |         | 83           |
| 84  |                           |         |         | 84           |
| 85  |                           |         |         | 85           |
| 86  |                           |         |         | 86           |
| 87  |                           |         |         | 87           |
| 88  |                           |         |         | 88           |
| 89  |                           |         |         | 89           |
| 90  |                           |         |         | 90           |
| 91  |                           |         |         | 91           |
| 92  |                           |         |         | 92           |
| 93  |                           |         |         | 93           |
| 94  |                           |         |         | 94           |
| 95  |                           |         |         | 95           |
| 96  |                           |         |         | 96           |
| 97  |                           |         |         | 97           |
| 98  |                           |         |         | 98           |
| 99  |                           |         |         | 99           |
| 100 |                           |         |         | 100          |
|     |                           |         |         |              |

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

  
NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP  
NIP. 19730401 199303 1 002





**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
DALAM RANGKA MEMBAHAS  
RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KAMIS, 13 NOPEMBER 2025**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN**  
**SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

- Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

**Yang saya hormati,**

- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati Rembang
- Asisten I, II, III Sekda Kabupaten Rembang
- Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian SetdaKab.Rembang
- Camat se-Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

**I. PENDAHULUAN :**

1. Bahwa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, maka perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang melakukan pendalaman materi Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 bersama OPD dan TAPD Kabupaten Rembang;
3. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

**II. DASAR**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
14. Surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/5159/2025 tanggal 24 Oktober 2025, perihal Pengiriman Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
15. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Oktober 2025 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUA- PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

## II. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 3 Nopember 2025  
Jam : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Penjelasan RKUA-PPAS TA 2026 dan Penjelasan tentang TPP ASN Tahun Anggaran 2026
  
2. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 3 Nopember 2025  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Membahas strategi penyiapan materi masukan tentang RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026
  
3. Rapat Komisi DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD pada :  
Hari : Selasa - Jumat  
Tanggal : 4 – 7 Nopember 2025  
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Komisi DPRD Kabupaten Rembang  
Acara : Membahas masukan Komisi kepada Banggar terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
  
4. Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 10 Nopember 2025  
Jam : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Banggar DPRD Kabupaten Rembang  
Acara : Laporan Masukan Komisi kepada Banggar terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.



5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Nopember 2025  
Jam : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Sinkronisasi hasil pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

6. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Nopember 2025  
Jam : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD  
Acara : Lanjutan Sinkronisasi hasil pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

#### **IV. HASIL RAPAT**

Dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran Kabupaten Rembang bersama TAPD Kabupaten Rembang telah disepakati bersama, sebagaimana dijabarkan dalam ringkasan sebagai berikut :

RINGKASAN RKUA PPAS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

| Kode   | Uraian                                                                    | RANCANGAN<br>KUAPPAS | Pembahasan        |                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
|        |                                                                           |                      | Menjadi           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
| 1      | 2                                                                         | 3                    | 4                 | 5                         |
| 4      | PENDAPATANDAERAH                                                          | 1,973,625,606,809    | 1,976,725,606,809 | 3,100,000,000             |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 461,373,908,490      | 464,473,908,490   | 3,100,000,000             |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                              | 177,352,800,000      | 177,352,800,000   | -                         |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                          | 259,894,644,080      | 262,994,644,080   | 3,100,000,000             |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 13,026,464,410       | 13,026,464,410    | -                         |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 11,100,000,000       | 11,100,000,000    | -                         |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 1,512,251,698,319    | 1,512,251,698,319 | -                         |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1,448,344,533,000    | 1,448,344,533,000 | -                         |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 63,907,165,319       | 63,907,165,319    | -                         |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | -                    | -                 | -                         |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                                          | -                    | -                 | -                         |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                    | -                 | -                         |
|        | Jumlah Pendapatan                                                         | 1,973,625,606,809    | 1,976,725,606,809 | 3,100,000,000             |
| 5      | BELANJA                                                                   | 1,987,060,757,185    | 1,990,160,757,185 | 3,100,000,000             |
|        | Jumlah Belanja                                                            | 1,987,060,757,185    | 1,990,160,757,185 | 3,100,000,000             |
|        | Total Surplus/(Defisit)                                                   | (13,435,150,376)     | (13,435,150,376)  | -                         |
| 6      | PEMBIAYAAN                                                                |                      |                   | -                         |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                     | 20,000,000,000       | 20,000,000,000    | -                         |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 5,000,000,000        | 5,000,000,000     | -                         |
| 6.1.04 | Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah                                        | 15,000,000,000       | 15,000,000,000    | -                         |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                              | 20,000,000,000       | 20,000,000,000    | -                         |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                    | 6,564,849,624        | 6,564,849,624     | -                         |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan                                                 | -                    | -                 | -                         |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                           | 6,564,849,624        | 6,564,849,624     | -                         |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                             | -                    | -                 | -                         |
|        | Pembiayaan Netto                                                          | 13,435,150,376       | 13,435,150,376    | -                         |
|        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan                     | -                    | -                 | -                         |

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| NO | OPD                                                         | RANCANGAN KUA PPAS     |                        |                                                   |                        |                                      |                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH |                        |                                                   |                        | PENDAPATAN TRANSFER                  |                                  |
|    |                                                             | Pajak Daerah           | Retribusi Daerah       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Lain-lain PAD yang Sah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Pendapatan Transfer Antar Daerah |
| 1  | 2                                                           | 3                      | 4                      | 5                                                 | 6                      | 7                                    | 8                                |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                      |                        | 25,000,000             |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                             |                        | 240,666,500,000        |                                                   | -                      |                                      |                                  |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                     |                        | 3,000,000,000          |                                                   | 30,000,000             |                                      |                                  |
| 4  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                  |                        | 150,000,000            |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 5  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      |                        | 1,200,000,000          |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 6  | DINAS PERHUBUNGAN                                           |                        | 472,135,080            |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 7  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            |                        | -                      |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 8  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                             |                        | 445,000,000            |                                                   | 70,000,000             |                                      |                                  |
| 9  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                |                        | 8,000,000,000          |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 10 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |                        | 5,636,009,000          |                                                   | -                      |                                      |                                  |
| 11 | SETDA                                                       |                        | 300,000,000            |                                                   |                        |                                      |                                  |
| 12 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH      | 177,352,800,000        | -                      | 13,026,464,409                                    | 11,000,000,000         | 1,448,344,533,000                    | 63,907,165,319                   |
|    | <b>JUMLAH</b>                                               | <b>177,352,800,000</b> | <b>259,894,644,080</b> | <b>13,026,464,409</b>                             | <b>11,100,000,000</b>  | <b>1,448,344,533,000</b>             | <b>63,907,165,319</b>            |



**Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan**

| NO | OPD                                                         | PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS        |                                                                           |                          |                        |                        |                                                   |                        |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                             | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |                                                                           | JUMLAH                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH |                        |                                                   |                        |
|    |                                                             | Pendapatan Hibah                     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                          | Pajak Daerah           | Retribusi Daerah       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Lain-lain PAD yang Sah |
| 1  | 2                                                           | 9                                    | 10                                                                        | 11                       | 12                     | 13                     | 14                                                | 15                     |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                      |                                      |                                                                           | 25,000,000               |                        | 25,000,000             |                                                   |                        |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                             |                                      |                                                                           | 240,666,500,000          |                        | 240,666,500,000        |                                                   | -                      |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                     |                                      |                                                                           | 3,030,000,000            |                        | 4,000,000,000          |                                                   | 30,000,000             |
| 4  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                  |                                      |                                                                           | 150,000,000              |                        | 150,000,000            |                                                   |                        |
| 5  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      |                                      |                                                                           | 1,200,000,000            |                        | 1,200,000,000          |                                                   |                        |
| 6  | DINAS PERHUBUNGAN                                           |                                      |                                                                           | 472,135,080              |                        | 572,135,080            |                                                   |                        |
| 7  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            |                                      |                                                                           | -                        |                        | -                      |                                                   |                        |
| 8  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                             |                                      |                                                                           | 515,000,000              |                        | 445,000,000            |                                                   | 70,000,000             |
| 9  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                |                                      |                                                                           | 8,000,000,000            |                        | 10,000,000,000         |                                                   |                        |
| 10 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                      |                                                                           | 5,636,009,000            |                        | 5,636,009,000          |                                                   | -                      |
| 11 | SETDA                                                       |                                      |                                                                           | 300,000,000              |                        | 300,000,000            |                                                   |                        |
| 12 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH      | -                                    | -                                                                         | 1,713,630,962,728        | 177,352,800,000        | -                      | 13,026,464,409                                    | 11,000,000,000         |
|    | <b>JUMLAH</b>                                               | -                                    | -                                                                         | <b>1,973,625,606,808</b> | <b>177,352,800,000</b> | <b>262,994,644,080</b> | <b>13,026,464,409</b>                             | <b>11,100,000,000</b>  |



**Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satu:**

| NO | OPD                                                         |                                      |                                  |                                      |                                                                           | JUMLAH            | PENDAPATAN ASLI DAERAH |                  |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|    |                                                             | PENDAPATAN TRANSFER                  |                                  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |                                                                           |                   | Pajak Daerah           | Retribusi Daerah |
|    |                                                             | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Pendapatan Hibah                     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                   |                        |                  |
| 1  | 2                                                           | 16                                   | 17                               | 18                                   | 19                                                                        | 20                | 21=12-3                | 22=13-4          |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                      |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 25,000,000        | -                      | -                |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                             |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 240,666,500,000   | -                      | -                |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                     |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 4,030,000,000     | -                      | 1,000,000,000    |
| 4  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                  |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 150,000,000       | -                      | -                |
| 5  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 1,200,000,000     | -                      | -                |
| 6  | DINAS PERHUBUNGAN                                           |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 572,135,080       | -                      | 100,000,000      |
| 7  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            |                                      |                                  |                                      |                                                                           | -                 | -                      | -                |
| 8  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                             |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 515,000,000       | -                      | -                |
| 9  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 10,000,000,000    | -                      | 2,000,000,000    |
| 10 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 5,636,009,000     | -                      | -                |
| 11 | SETDA                                                       |                                      |                                  |                                      |                                                                           | 300,000,000       | -                      | -                |
| 12 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH      | 1,448,344,533,000                    | 63,907,165,319                   | -                                    | -                                                                         | 1,713,630,962,728 | -                      | -                |
|    | JUMLAH                                                      | 1,448,344,533,000                    | 63,907,165,319                   | -                                    | -                                                                         | 1,976,725,606,808 | -                      | 3,100,000,000    |

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satu:

| NO | OPD                                                         | BERTAMBAH / (BERKURANG)                           |                        |                                      |                                  |                                      |                                                                           | JUMLAH        |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                             |                                                   |                        | PENDAPATAN TRANSFER                  |                                  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |                                                                           |               |
|    |                                                             | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Lain-lain PAD yang Sah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Pendapatan Hibah                     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |               |
| 1  | 2                                                           | 23=14-5                                           | 24=15-6                | 25=16-7                              | 26=17-8                          | 27=18-9                              | 28=19-10                                                                  | 29=20-11      |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                      | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                             | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                     | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | 1,000,000,000 |
| 4  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                  | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 5  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 6  | DINAS PERHUBUNGAN                                           | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | 100,000,000   |
| 7  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 8  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                             | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 9  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | 2,000,000,000 |
| 10 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 11 | SETDA                                                       | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
| 12 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH      | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | -             |
|    | JUMLAH                                                      | -                                                 | -                      | -                                    | -                                | -                                    | -                                                                         | 3,100,000,000 |



REKAP OPD HASIL PEMBAHASAN KUA PPAS 2026

| Kode | URAIAN                                                               | PENDAPATAN                | R KUA PPAS 2026    | BELANJA            |                           | Catatan |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|
|      |                                                                      | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |                    | PEMBAHASAN         |                           |         |
|      |                                                                      |                           |                    | MENJADI            | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |         |
| 1    | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                               |                           | 649.974.253.208.00 | 647.779.282.568.00 | (2.194.970.640)           |         |
| 2    | DINAS KESEHATAN                                                      |                           | 480.778.690.098.85 | 480.778.690.098.85 | -                         |         |
| 3    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 1.000.000.000             | 69.075.585.044.50  | 70.972.585.044.50  | 1.897.000.000             |         |
| 4    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               |                           | 9.002.568.775.50   | 9.052.568.775.50   | 50.000.000                |         |
| 5    | SATPOL PP                                                            |                           | 9.041.309.956.28   | 9.041.309.956.28   | -                         |         |
| 6    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                  |                           | 8.687.237.020.03   | 8.687.237.020.03   | -                         |         |
| 7    | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA          |                           | 17.135.935.975.00  | 17.085.935.975.00  | (50.000.000)              |         |
| 8    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                           |                           | 36.042.567.754.50  | 35.776.567.754.50  | (266.000.000)             |         |
| 9    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                               | 100.000.000               | 20.982.569.836.50  | 21.082.569.836.50  | 100.000.000               |         |
| 10   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL                                 |                           | 5.592.892.844.50   | 5.592.892.844.50   | -                         |         |
| 11   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                               |                           | 11.027.903.218.50  | 11.477.834.566.50  | 449.931.348               |         |
| 12   | DINAS PERHUBUNGAN                                                    |                           | 23.866.172.915.00  | 23.866.172.915.00  | -                         |         |
| 13   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                     |                           | 7.645.580.055.00   | 7.735.580.055.00   | 90.000.000                |         |
| 14   | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |                           | 5.005.982.993      | 5.005.982.993      | -                         |         |
| 15   | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                      |                           | 7.586.387.870      | 7.601.387.870      | 15.000.000                |         |
| 16   | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                     |                           | 6.213.887.160      | 6.113.887.160      | (100.000.000)             |         |
| 17   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                         | 2.000.000.000             | 15.139.652.330     | 17.054.652.330     | 1.915.000.000             |         |
| 18   | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH          |                           | 20.549.987.383     | 20.369.987.383     | (180.000.000)             |         |
| 19   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA                                 |                           | 8.665.762.429      | 8.665.762.429      | -                         |         |
| 20   | SETDA                                                                |                           | 61.574.527.443     | 62.159.527.443     | 585.000.000               |         |
| 21   | SEKRETARIAT DPRD                                                     |                           | 51.210.805.392     | 53.592.776.032     | 2.381.970.640             |         |
| 22   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                 |                           | 7.163.362.251      | 7.163.362.251      | -                         |         |
| 23   | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH               |                           | 374.702.038.133    | 373.539.106.785    | (1.162.931.348)           |         |



| Kode | URAIAN                                                     | PENDAPATAN                | R KUA PPAS 2026   | BELANJA           |                           | Catatan |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------|
|      |                                                            | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |                   | PEMBAHASAN        |                           |         |
|      |                                                            |                           |                   | MENJADI           | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |         |
| 24   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                   |                           | 7.616.898.710     | 7.616.898.710     | -                         |         |
| 25   | INSPEKTORAT                                                |                           | 17.698.464.632    | 17.698.464.632    | -                         |         |
| 26   | KECAMATAN REMBANG                                          |                           | 9.128.860.722     | 9.378.860.722     | 250.000.000               |         |
| 27   | KECAMATAN KALIORI                                          |                           | 2.427.200.480     | 2.427.200.480     | -                         |         |
| 28   | KECAMATAN SULANG                                           |                           | 2.694.813.590     | 2.694.813.590     | -                         |         |
| 29   | KECAMATAN SUMBER                                           |                           | 2.741.614.751     | 2.741.614.751     | -                         |         |
| 30   | KECAMATAN BULU                                             |                           | 2.450.953.566     | 2.450.953.566     | -                         |         |
| 31   | KECAMATAN LASEM                                            |                           | 2.532.468.950     | 2.532.468.950     | -                         |         |
| 32   | KECAMATAN PANCUR                                           |                           | 2.844.310.110     | 2.844.310.110     | -                         |         |
| 33   | KECAMATAN SLUKE                                            |                           | 2.607.352.510     | 2.607.352.510     | -                         |         |
| 34   | KECAMATAN PAMOTAN                                          |                           | 2.698.646.152     | 2.748.646.152     | 50.000.000                |         |
| 35   | KECAMATAN GUNEM                                            |                           | 2.455.397.955     | 2.455.397.955     | -                         |         |
| 36   | KECAMATAN SALE                                             |                           | 2.597.558.870     | 2.597.558.870     | -                         |         |
| 37   | KECAMATAN KRAGAN                                           |                           | 2.914.524.535     | 2.914.524.535     | -                         |         |
| 38   | KECAMATAN SEDAN                                            |                           | 3.081.281.014     | 3.081.281.014     | -                         |         |
| 39   | KECAMATAN SARANG                                           |                           | 2.842.225.740     | 2.942.225.740     | 100.000.000               |         |
| 40   | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                           | 11.062.524.815    | 10.232.524.815    | (830.000.000)             |         |
|      | JUMLAH                                                     | 3,100,000,000             | 1,987,060,757,185 | 1,990,160,757,185 | 3,100,000,000             |         |
|      |                                                            |                           |                   |                   |                           |         |
|      | SURPLUS/(DEFISIT)                                          |                           |                   | -                 | -                         |         |

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian                                           | Jumlah         | Pembahasan     |                        |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
|               |                                                  |                | Menjadi        | Bertambah/ (Berkurang) |
| 6             | PEMBIAYAAN                                       | 13,435,150,376 | 13,435,150,376 | -                      |
| 6.1           | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | -                      |
| 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5,000,000,000  | 5,000,000,000  | -                      |
| 6.1.04        | Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah               | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | -                      |
|               | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | -                      |
| 6.2           | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 6,564,849,624  | 6,564,849,624  | -                      |
| 6.2.01        | Pembentukan Dana Cadangan                        | -              | -              | -                      |
| 6.2.03        | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 6,564,849,624  | 6,564,849,624  |                        |
|               | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                    | 6,564,849,624  | 6,564,849,624  | -                      |
|               | Pembiayaan Netto :                               | 13,435,150,376 | 13,435,150,376 | -                      |



| Kode | URAIAN | PENDAPATAN<br>BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | BELANJA         |                                      | Catatan |
|------|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
|      |        |                                         | R KUA PPAS 2026 | PEMBAHASAN                           |         |
|      |        |                                         |                 | MENJADI<br>BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |         |

CATATAN - CATATAN

|   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | PENAMBAHAN/PENGURANGAN BANGGAR - TAPD                                                                                                                                                           |  |  |                 |                                                          |
|   | Gaji BPPKAO                                                                                                                                                                                     |  |  | (766.931,348)   | 23 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|   | Gaji Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                      |  |  | (2.381.970.640) | 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
|   | Penambahan anggaran untuk Gaji PJK pada DINPERMADES                                                                                                                                             |  |  | 449.931,348     | 11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                |
|   | Gaji PPPK Paruh waktu untuk 4 org                                                                                                                                                               |  |  | 96.000.000      | 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
|   | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Outsourcing) 4 org x 12 bl x 3.700.000,-                                                                                                                        |  |  | 177.600.000     | 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
|   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Outsourcing) 1 org x 12 bl x 3.700.000,-                                                                                                                          |  |  | 44.400.000      | 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
|   | Kekurangan rees DPRD 1 kali ( SET DPRD)                                                                                                                                                         |  |  | 2.381.970.640   | 21 SEKRETARIAT DPRD                                      |
|   | Seluncuran Es, Polisi menambah PAD dengan adanya Penyediaan Fasilitas di TPI                                                                                                                    |  |  | 50.000.000      | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Basket 1000 buah ,Polisi menambah PAD dengan adanya Penyediaan Fasilitas di TPI                                                                                                                 |  |  | 200.000.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Penataan Lingkungan TPI Karanganyar                                                                                                                                                             |  |  | 238.421.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Operasional TPI ,untukperambatanlampu di sepanjangdermaga di semua TPI                                                                                                                          |  |  | 35.000.000      | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Penguatan manajemen operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                        |  |  | 200.000.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Rehabilitasi saluran air tpi sarang ,Belum adanya saluran air di disebelah utara TPI menyebabkan air meluber kejalan utama                                                                      |  |  | 150.000.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Asuransi kenelayanan (3.744 x 201.600) ,untuk memfasilitasi pembayaran premi asuransi nelayan kecil dengan estimasi @201.600 untuk 3.744 orang, dan untuk operasional berupa penyusunan regulas |  |  | 811.579.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Rehabilitasi Pagar BBI                                                                                                                                                                          |  |  | 100.000.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Pelaksanaan Forum OPD                                                                                                                                                                           |  |  | 50.000.000      | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Belanja Modal (Laptop 10 Buah @10Juta)                                                                                                                                                          |  |  | 100.000.000     | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Belanja Modal (Printer 10 Buah @5Juta)                                                                                                                                                          |  |  | 50.000.000      | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | PENAMBAHAN OPERASIONAL TIGA BIDANG @ 5Juta, Rp 15.000.000,-                                                                                                                                     |  |  | 15.000.000      | 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          |
|   | Lanjutan gedung DPU Tata Ruang                                                                                                                                                                  |  |  | 430.000.000     | 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG               |
|   | Operasional untuk PBG                                                                                                                                                                           |  |  | 170.000.000     | 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG               |
|   | Pelatihan sertifikat SKA                                                                                                                                                                        |  |  | 100.000.000     | 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG               |



| Kode | URAIAN                                                 | PENDAPATAN                | R KUA PPAS 2026 | BELANJA     |                           | Catatan                                    |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                        | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |                 | PEMBAHASAN  |                           |                                            |
|      |                                                        |                           |                 | MENJADI     | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |                                            |
|      | Pengadaan mebelar gedung lanjutan DPUTARU              |                           |                 | 200.000.000 | 200.000.000               | 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|      | Peningkatan SDM koptensi bidang Tata Ruang             |                           |                 | 50.000.000  | 50.000.000                | 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|      | Pelaksanaan persetujuan subrtansi RDTR kabupaten/ kota |                           |                 | 50.000.000  | 50.000.000                | 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|      | kegiatan hari peringatan sampah                        |                           |                 | 100.000.000 | 100.000.000               | 09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|      |                                                        |                           |                 |             |                           |                                            |
|      |                                                        |                           |                 |             |                           |                                            |
|      | Jumlah                                                 |                           |                 |             | 3,100,000,000             |                                            |

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

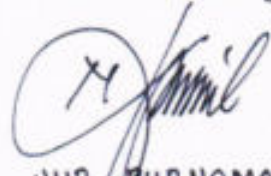
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rembang, 13 Nopember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,  
  
H. ABDUL ROUF

Juru Bicara Banggar

  
NUR PURNOMO MULIADI WIDO DODO, SIP  
NIP. 19730401 139303 1002



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling lambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepehati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

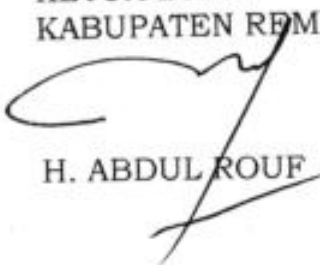
Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 10 November 2025;  
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 November 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 13 November 2025  
KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

  
H. ABDUL ROUF



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
KETUA,

  
ABDUL ROUF





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA DI BADAN  
KEHORMATAN SESUAI HASIL FASILITASI GUBERNUR  
JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/100.3/143/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kbupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
KETUA,

ABDUL ROUF

| Jenis Jabatan | Paraf |
|---------------|-------|
| Bekwan        |       |
| Kabdag        | /     |
| Kasubbag      |       |

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 019.6 / 5342 / 2025**  
**NOMOR : 019.6 / 82 / 2025**  
**TANGGAL : 13 November 2025**  
**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, S.E.  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
d. Nama : H. GUNASIH.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,



untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Program dan Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rembang, 13 November 2025

**BUPATI REMBANG  
SELAKU PIHAK KESATU**



**H. HARNO, S.E.**

**PIMPINAN DPRD  
SELAKU PIHAK KEDUA**



**H. ABDUL ROUF  
KETUA**

**H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
WAKIL KETUA**

**RIDWAN.S.H.M.H.  
WAKIL KETUA**

**H. GUNASIH, S.E  
WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**NOMCR : 019.6/5342/ 2025**  
**NOMOR : 019.6/ 83 / 2025**  
**TANGGAL : 25 November 2025**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, S.E.  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : R DWAN, S.H,M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
d. Nama : H. GUNASIH, S.E.  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

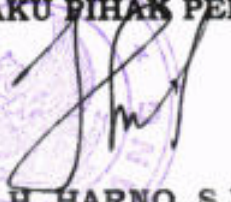
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rembang, 13 November 2025

**BUPATI REMBANG  
SELAKU PIHAK PERTAMA**

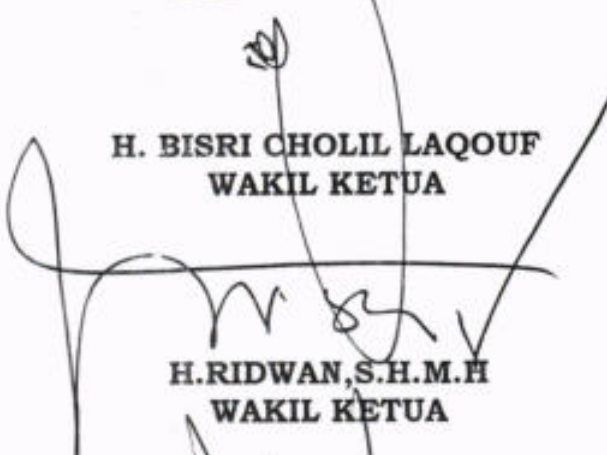


**H. HARNO, S.E.**

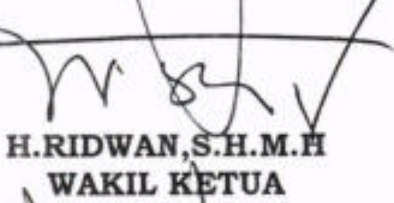
**PIMPINAN DPRD  
SELAKU PIHAK KEDUA**



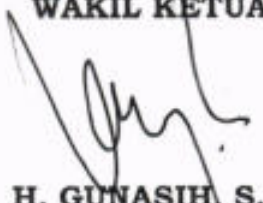
**H. ABDUL ROUF  
KETUA**



**H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
WAKIL KETUA**



**H. RIDWAN, S.H.M.H  
WAKIL KETUA**



**H. GUNASIH, S.E  
WAKIL KETUA**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setwan@rembangkab.go.id

**REMBANG**

---

**BERITA ACARA**

NOMOR : 100.1.4.2 / 84 / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh sebanyak 28 anggota, telah dilakukan pengambilan keputusan atas pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

Dari pengambilan keputusan dihasilkan bahwa anggota DPRD yang hadir **menyetujui Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 40 ( empat puluh ) Perangkat Daerah sebesar Rp. 62.675.301.485,00 ( enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ).**

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Ketua DPRD

H. ABDUL ROUF